

Makna Keberlanjutan bagi Petani Rakyat dalam Industri Karet Remah: Studi Kualitatif Kritis di Sumatera Selatan

(The Meaning of Sustainability for Smallholder Farmers in the Crumb Rubber Industry: A Critical Qualitative Study in South Sumatra)

Hendy Endarwan¹, Wilfridus B Elu², Tiolina Evi³ Gary Putra Etwanto⁴

Perbanas Institute, Jakarta¹²³⁴

hendy.endarwan@gmail.com¹, Wilfridus@gmail.com², tiolina@perbanas.id³, garyetwanto@gmail.com⁴



Sejarah Revisi Artikel :
Received on 15 Oktober 2025
1st Revision on 27 Oktober 2025
Accepted on 30 Oktober 2025

Doi :
<https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i4.156>

Ciptaan disebarluaskan dibawah :



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract: This study examines the discourse of sustainability in Indonesia's crumb rubber industry through a critical paradigm.

Objective: To explore the meaning of sustainability from the perspective of smallholder farmers, analyze the influence of power dynamic within the rubber industry, and identify local forms of resistance against the dominance of corporate sustainability discourse.

Methodology: This study uses a qualitative approach with Fairclough's Critical Discourse Analysis, drawing data from interviews, FGDs, observations, and policy and CSR documents. The analysis focuses on text, discursive, and social practices.

Research Results: The study finds that smallholder farmers' "sustainability from below" (focused on social justice and fair livelihood) fundamentally counters the dominant technocratic discourse of efficiency and certification in the crumb rubber industry. Achieving equitable sustainability necessitates structural transformation via an Inclusive Closed-Loop Supply Chain (ICLSC) model that mandates equity and participation.

Keywords: Critical Sustainability, Smallholder Farmers, Crumb Rubber Industry, Critical Paradigm, Social Discourse, CDA.

1. Pendahuluan

Industri karet remah merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Selatan yang dikenal sebagai penghasil karet alam terbesar di tanah air. Berdasarkan data Perkebunan (2019), lebih dari 90% produksi karet di provinsi ini berasal dari petani rakyat yang mengelola lahan berskala kecil. Kontribusi sektor ini terhadap ekspor nasional dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan, namun ironisnya, kesejahteraan petani karet tidak menunjukkan peningkatan berarti. Harga jual getah yang fluktuatif, ketergantungan pada tengkulak, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan menyebabkan ketimpangan struktural dalam rantai nilai industri karet remah.

Dalam situasi tersebut, konsep keberlanjutan (*sustainability*) sering diangkat sebagai solusi yang menjanjikan. Akan tetapi, implementasinya di tingkat lapangan cenderung sempit, terbatas pada aspek teknokratis dan ekologis, seperti efisiensi produksi, pengurangan limbah, dan pemenuhan standar sertifikasi internasional. Model keberlanjutan yang dikembangkan korporasi global dan lembaga sertifikasi, seperti *Forest Stewardship Council (FSC)* atau *Sustainable Natural Rubber Initiative (SNR-i)*, umumnya menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan produktivitas hijau sebagai ukuran keberhasilan. Pendekatan semacam ini selaras dengan paradigma *green economy* yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, tetapi sering kali mengabaikan dimensi sosial, politik, dan keadilan distributif (Elkington 1997; Schaltegger and Burritt, 2018).

Bagi petani rakyat, keberlanjutan bukan sekadar tentang menjaga hutan atau mengurangi emisi karbon, tetapi lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup dan keberdayaan ekonomi di tengah sistem yang tidak seimbang. Perspektif ini sejalan dengan pandangan (Bryant and Bailey 1997) yang menegaskan bahwa isu lingkungan selalu terkait erat dengan relasi kekuasaan antara aktor-aktor sosial, baik negara, korporasi, maupun masyarakat lokal. Dalam konteks industri karet remah, relasi kuasa tersebut tampak pada struktur rantai pasok yang hierarkis, di mana petani berada pada posisi paling bawah dan memiliki daya tawar terbatas terhadap harga serta kebijakan pasar.

Keberlanjutan, dalam wacana dominan industri, lebih sering dimaknai sebagai proyek teknokratis yang netral secara politik. Namun, dalam kenyataannya, wacana ini justru mereproduksi ketimpangan sosial dan ekonomi, karena aktor-aktor dominan memiliki kuasa untuk menentukan makna, indikator, dan standar dari apa yang disebut “berkelanjutan”. Dengan demikian, konsep keberlanjutan tidak bisa dipandang hanya sebagai kategori teknis, melainkan sebagai arena ideologis dan politis yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi global serta struktur kapitalisme agraria.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar wacana keberlanjutan dalam industri karet remah melalui lensa paradigma kritis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami :

1. Bagaimana petani rakyat memaknai keberlanjutan dalam konteks kehidupan sosial-ekonomi mereka.
2. Bagaimana struktur kekuasaan dan kebijakan industri membentuk pemaknaan tersebut dan
3. Bagaimana muncul bentuk-bentuk resistensi lokal terhadap dominasi wacana korporatif yang mengatasnamakan keberlanjutan.

Dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis (CDA)* model (Fairclough 1992), penelitian ini tidak hanya menelaah teks dan bahasa keberlanjutan yang muncul dalam dokumen, laporan, dan kebijakan industri, tetapi juga menelusuri praktik sosial dan ideologi yang melandasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang keberlanjutan sebagai konstruksi sosial, sekaligus menawarkan kerangka konseptual alternatif yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi petani rakyat dalam industri karet remah di Indonesia.

Industri karet remah merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan yang dikenal sebagai penghasil karet alam terbesar di Indonesia (Perkebunan 2019). Namun, di balik kontribusi besar terhadap ekspor nasional, kondisi petani karet rakyat justru stagnan, dengan pendapatan yang fluktuatif dan posisi tawar lemah dalam rantai pasok global. Dalam konteks ini,

keberlanjutan sering dipahami hanya sebagai upaya menjaga lingkungan dan efisiensi produksi, tanpa memperhatikan dimensi sosial dan struktural yang membentuk relasi ekonomi-politik (Elkington 1997 ; Schaltegger and Burritt, 2018).

Narasi keberlanjutan yang dominan pada industri karet remah cenderung berakar pada paradigma teknokratis dan ekonomi hijau (*green economy*), di mana indikator keberhasilan diukur melalui sertifikasi, efisiensi sumber daya, dan kepatuhan pada standar global seperti *Forest Stewardship Council* (FSC) atau *Sustainable Natural Rubber Initiative* (SNR-i). Namun, bagi petani kecil, keberlanjutan memiliki makna yang lebih kompleks dan kontekstual terkait dengan kelangsungan hidup, keadilan sosial, dan keberdayaan ekonomi (Bryant and Bailey, 1997).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membongkar wacana keberlanjutan dalam industri karet remah melalui lensa paradigma kritis, untuk memahami bagaimana petani rakyat memaknai keberlanjutan, bagaimana struktur kekuasaan membentuk pemaknaan tersebut, dan bagaimana resistensi lokal muncul terhadap dominasi wacana korporatif.

2. Kajian Teori

2.1. Keberlanjutan sebagai Wacana Sosial

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) pada awalnya berakar dari kekhawatiran global terhadap krisis lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Melalui *World Commission on Environment and Development* (Brundtland & Mansour, 2010), keberlanjutan didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring perkembangan waktu, konsep ini mengalami perluasan makna menjadi paradigma pembangunan global yang multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam praktik bisnis dan industri, keberlanjutan banyak dioperasionalkan melalui konsep *Triple Bottom Line* (Elkington and Rowlands 1999), menekankan keseimbangan antara *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan). Pendekatan ini banyak digunakan oleh perusahaan dan lembaga sertifikasi sebagai

standar keberlanjutan yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun demikian, sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa paradigma ini sering kali bersifat instrumental dan korporat-sentris, karena lebih menekankan legitimasi ekonomi dan citra perusahaan dibandingkan transformasi sosial yang substantif (Banerjee 2003); (Milne 2009). Dalam konteks ini, keberlanjutan berpotensi menjadi *buzzword* yang menutupi ketimpangan struktural antara aktor industri besar dan produsen kecil, seperti petani rakyat.

Dari perspektif teori wacana, keberlanjutan bukanlah konsep yang netral atau bebas nilai. Sebaliknya, ia merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui bahasa, praktik institusional, dan relasi kekuasaan (Dryzek 2022). Setiap actor baik pemerintah, industri, lembaga internasional, maupun masyarakat local memiliki posisi dan kepentingan tertentu dalam mendefinisikan apa yang dianggap “berkelanjutan.” Oleh karena itu, wacana keberlanjutan perlu dipahami sebagai arena kontestasi makna, di mana nilai-nilai ekonomi, sosial, politik, dan ekologis saling berinteraksi dan bernegosiasi.

Dalam konteks industri karet remah di Sumatera Selatan, wacana keberlanjutan cenderung didominasi oleh narasi teknokratis seperti “produksi bersih”, “efisiensi rantai pasok”, atau “kepatuhan terhadap standar sertifikasi”. Narasi ini sering kali mencerminkan perspektif korporasi dan kebijakan industri yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing pasar global. Sementara itu, dimensi kesejahteraan petani rakyat sebagai produsen utama bahan baku karet seringkali tidak dijadikan indikator utama dalam penilaian keberlanjutan.

Akibatnya, terjadi asimetri makna dan kepentingan dalam praktik keberlanjutan: di satu sisi, perusahaan memperoleh legitimasi melalui sertifikasi dan pelaporan CSR; di sisi lain, petani tetap berada pada posisi subordinat dalam rantai nilai. Melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* (Fairclough 1992), penelitian ini memandang keberlanjutan sebagai wacana sosial berlapis, di mana makna dominan dikritisi untuk mengungkap dimensi ideologis dan kekuasaan yang melatarinya.

Dengan demikian, memahami keberlanjutan sebagai wacana sosial berarti tidak hanya mempelajari *apa* yang dikatakan tentang keberlanjutan, tetapi juga *siapa* yang

berhak mengatakan, bagaimana makna itu disebarkan, serta kepentingan apa yang diperkuat melalui penggunaan istilah tersebut.

2.2. Petani Karet dan Rantai Nilai Global

Dalam struktur rantai nilai global industri karet remah, posisi petani rakyat berada pada lapisan paling bawah dari sistem ekonomi yang kompleks dan hierarkis. Mereka berperan sebagai penyedia bahan baku utama, yakni lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat), namun memiliki akses yang sangat terbatas terhadap nilai tambah dari proses pengolahan dan perdagangan internasional. Sebaliknya, tahapan pengolahan, ekspor, dan distribusi hasil karet umumnya dikendalikan oleh korporasi besar, pabrik pengolah, dan eksportir multinasional yang memiliki modal, teknologi, serta jaringan pasar global yang kuat.

Kondisi ini menciptakan ketergantungan asimetris antara petani dan korporasi. Petani karet tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual, standar mutu, maupun akses pasar. Mereka kerap menghadapi fluktuasi harga global, sementara biaya produksi di tingkat lokal relatif tinggi. Akibatnya, margin keuntungan yang diterima petani sangat kecil, bahkan sering tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung, seperti ketidakpastian cuaca, biaya pupuk, dan penurunan produktivitas lahan.

Praktik kemitraan yang diklaim sebagai “berkelanjutan” oleh perusahaan atau lembaga sertifikasi sering kali hanya memperindah citra industri, tanpa benar-benar mengubah relasi kekuasaan yang timpang di tingkat akar rumput. Sebagaimana dikemukakan (Li 2020), berbagai program kemitraan yang dikemas dalam narasi keberlanjutan justru menyembunyikan relasi eksploitatif melalui mekanisme kontrak yang tidak adil, penetapan harga sepihak, dan kontrol mutu yang bias terhadap kepentingan perusahaan. Dalam banyak kasus, petani hanya menjadi pelaku pasif dalam sistem sertifikasi, di mana mereka diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan yang ditentukan dari luar, tanpa dilibatkan secara substantif dalam perumusan standar tersebut.

Pendekatan keberlanjutan yang terlalu menekankan pada aspek sertifikasi dan kepatuhan administratif tanpa memperhatikan keadilan dalam distribusi nilai tambah justru berpotensi memperkuat ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, keberlanjutan berubah menjadi sekadar alat legitimasi ekonomi, bukan instrumen transformasi sosial. Petani berada dalam posisi rentan, sementara keuntungan besar mengalir ke perusahaan pengolah dan eksportir yang menguasai rantai nilai global. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika keberlanjutan dalam industri karet remah secara utuh, perlu dilakukan analisis kritis terhadap relasi kuasa dalam rantai nilai global. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana narasi keberlanjutan dibangun dan dioperasionalisasikan oleh aktor-aktor dominan, serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi struktur sosial-ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai keberlanjutan dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga dari dimensi keadilan sosial dan inklusi petani rakyat dalam rantai nilai.

Transformasi menuju keberlanjutan yang sejati memerlukan reorientasi paradigma dari keberlanjutan yang bersifat korporatif dan teknokratis menuju keberlanjutan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam kerangka inilah konsep *inclusive closed-loop supply chain* menjadi relevan: suatu model rantai pasok yang tidak hanya menekankan efisiensi dan sirkularitas, tetapi juga memastikan pembagian nilai yang lebih adil bagi petani sebagai aktor kunci dalam ekosistem produksi karet.

2.3. Perbandingan Paradigma Penelitian Keberlanjutan: Positivisme, Post-positivisme, Konstruktivisme, dan Kritis

Dalam kajian filsafat ilmu, paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menentukan bagaimana seorang peneliti memandang realitas (ontologi), memperoleh pengetahuan (epistemologi), menempatkan nilai (aksiologi), menggunakan metode (metodologi), serta menyampaikan temuan ilmiahnya (retorika). Paradigma bukan sekadar pilihan teknis, melainkan landasan filosofis yang membentuk arah, tujuan, dan etika penelitian (Kuhn, 1970). Oleh karena itu, memahami perbedaan paradigma menjadi penting untuk menempatkan penelitian

keberlanjutan secara tepat, terutama ketika penelitian ini berupaya mengungkap dimensi sosial dan kekuasaan di balik praktik industri karet remah.

Berikut penjelasan perbandingan empat paradigma utama yang digunakan dalam studi keberlanjutan :

a. Paradigma Positivisme

Paradigma positivisme berakar dari pemikiran (Mayadah, 2022) yang menekankan bahwa pengetahuan yang sah hanya berasal dari fakta empiris yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Ontologinya berpijak pada keyakinan akan realitas tunggal (*single objective reality*) yang eksis di luar kesadaran manusia dan dapat dijelaskan melalui hukum sebab-akibat. Dalam epistemologi positivisme, peneliti berperan sebagai pengamat netral yang menjaga jarak dari objek penelitian. Aksiologinya menolak campur tangan nilai atau moral, sebab nilai dianggap dapat mengganggu objektivitas penelitian.

Dalam konteks penelitian keberlanjutan, paradigma positivisme banyak digunakan untuk studi yang bersifat kuantitatif dan teknokratis, seperti pengukuran efisiensi energi, analisis *Life Cycle Assessment (LCA)*, dan pemodelan dampak lingkungan berbasis data statistik. Pendekatan ini berguna untuk mengukur capaian numerik, namun memiliki keterbatasan dalam memahami dimensi sosial, budaya, dan kekuasaan, karena hanya menyoroti fenomena yang dapat diukur secara empiris. Dengan kata lain, positivisme lebih memotret apa yang terlihat daripada mengapa sesuatu terjadi.

b. Paradigma Post-positivisme

Paradigma post-positivisme muncul sebagai koreksi terhadap determinisme positivistik. Tokoh seperti Popper (1959) menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak bersifat absolut, melainkan sementara dan terbuka terhadap falsifikasi. Ontologinya mengakui bahwa realitas bersifat kompleks dan sebagian dapat diketahui, namun pengamatan manusia selalu mengandung bias. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah dianggap pendekatan probabilistik, bukan kepastian mutlak.

Epistemologi post-positivistik tetap menghargai data empiris, tetapi membuka ruang bagi interpretasi dan refleksi kritis. Peneliti diakui memiliki pengaruh terhadap proses penelitian, meski tetap berupaya menjaga objektivitas melalui triangulasi, validasi, dan analisis multimetode. Dalam konteks keberlanjutan, paradigma ini banyak digunakan dalam penelitian evaluatif dan kebijakan publik, seperti penilaian efektivitas program lingkungan, pengembangan indikator keberlanjutan atau simulasi sistem sosial-ekologis.

Keterbatasan utama paradigma ini adalah masih berpusat pada pendekatan sistem dan rasionalitas ilmiah, sehingga belum mampu menyingkap dimensi kekuasaan, ideologi, dan konflik kepentingan pembentuk praktik keberlanjutan.

c. Paradigma Konstruktivisme

Paradigma konstruktivisme menolak pandangan bahwa realitas bersifat tunggal dan objektif. Menurut (Berger and Luckmann 2016), realitas sosial merupakan hasil konstruksi intersubjektif yang dibangun melalui pengalaman, bahasa, dan interaksi manusia. Dengan demikian, tidak ada satu kebenaran universal, melainkan banyak versi kebenaran yang hidup dalam konteks sosial, budaya, dan historis tertentu.

Dalam epistemologi konstruktivisme, pengetahuan tidak ditemukan, tetapi diciptakan bersama antara peneliti dan partisipan melalui dialog dan interpretasi. Peneliti berperan sebagai *co-creator of meaning* yang menafsirkan realitas berdasarkan perspektif aktor sosial. Aksiologinya menekankan empati, keterlibatan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.

Paradigma ini sangat relevan dalam penelitian keberlanjutan yang berfokus pada pemaknaan lokal, misalnya memahami persepsi petani tentang praktik ramah lingkungan, nilai budaya dalam konservasi, atau adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim. Namun, kelemahannya adalah konstruktivisme cenderung deskriptif dan kurang menyoroti struktur kekuasaan yang menindas atau membatasi ruang sosial aktor lokal (Denzin and Lincoln 2011).

d. Paradigma Kritis

Paradigma kritis berkembang dari pemikiran Mazhab Frankfurt (Habermas, 1984) yang berupaya membebaskan ilmu pengetahuan dari dominasi ideologi dan kekuasaan. Paradigma ini memadukan kesadaran interpretatif konstruktivisme dengan orientasi transformasi sosial dan keadilan.

Secara ontologis, realitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan struktur ekonomi-politik. Epistemologinya bersifat dialogis dan reflektif, di mana peneliti berperan sebagai agen perubahan yang menyuarakan kelompok marjinal. Aksiologinya secara eksplisit berpihak pada emansipasi dan keadilan sosial, sehingga penelitian bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya.

Dalam konteks penelitian keberlanjutan, paradigma kritis menawarkan perspektif yang paling relevan untuk mengungkap ketimpangan struktural, seperti eksploitasi petani dalam rantai nilai global, praktik sertifikasi yang bias terhadap korporasi, atau ketidakadilan dalam distribusi nilai tambah. Pendekatan ini tidak berhenti pada deskripsi atau pengukuran, melainkan berupaya menantang dan mengubah struktur sosial yang menindas melalui analisis wacana, partisipasi reflektif, dan tindakan transformatif.

Paradigma kritis dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan pembacaan mendalam terhadap dimensi kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan dalam keberlanjutan industri karet remah. Berbeda dari positivisme yang menekankan pengukuran, atau konstruktivisme yang fokus pada makna, paradigma kritis berupaya mengungkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan di balik narasi keberlanjutan yang tampak netral. Pendekatan ini memungkinkan penelitian berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tabel 1. Rangkuman Perbandingan Keempat Paradigma

Aspek Filosofis	Positivisme	Post-positivisme	Konstruktivisme	Kritis
Ontologi	Realitas tunggal dan objektif	Realitas objektif, tetapi tidak sempurna	Banyak realitas sosial	Realitas dibentuk oleh kekuasaan dan ideologi
Epistemologi	Netral, empiris, bebas nilai	Empiris, tetapi sadar bias	Dialogis, subjektif	Reflektif, berpihak pada keadilan
Aksiologi	Nilai dikesampingkan	Nilai diakui tetapi dikontrol	Nilai melekat pada konteks	Nilai sebagai basis emansipasi
Metodologi	Kuantitatif, eksperimental	Triangulasi, survei, statistik	Kualitatif interpretatif	Kualitatif kritis (CDA, naratif)
Tujuan	Prediksi dan kontrol	Penjelasan dan verifikasi	Pemahaman makna	Transformasi sosial dan keadilan

Pemilihan paradigma kritis dalam penelitian ini didasarkan pada sifat masalah keberlanjutan yang tidak netral secara politik. Paradigma ini memberi ruang bagi peneliti untuk memihak pada kelompok terpinggirkan yakni petani karet rakyat dan mengungkap struktur ketidakadilan yang menyelimuti praktik keberlanjutan di industri karet remah di Indonesia.

2.4. Paradigma Kritis dalam Penelitian Keberlanjutan

Paradigma kritis berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial tidak bersifat netral atau objektif, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan, ideologi, serta struktur ekonomi-politik yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat (Habermas 1984). Paradigma ini menolak pandangan positivistik yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai dan netral. Sebaliknya, paradigma kritis meyakini bahwa ilmu pengetahuan selalu terkait dengan kepentingan tertentu baik ekonomi, politik, maupun sosial. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian dengan paradigma kritis bukan sekadar untuk menjelaskan

realitas, melainkan untuk mengkritisi struktur dominan yang menindas dan mendorong terjadinya transformasi sosial menuju tatanan yang lebih adil (Kincheloe and McLaren 2011).

Secara ontologis, paradigma kritis memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan dan ideologi. Artinya, apa yang disebut “kenyataan” tidak pernah sepenuhnya objektif, melainkan hasil dari proses historis, ekonomi, dan politik yang membentuk persepsi serta pengalaman sosial manusia. Dalam konteks industri karet remah, realitas keberlanjutan bukanlah kondisi yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh kebijakan, pasar global, dan narasi korporasi yang menentukan arah praktik produksi dan distribusi.

Secara epistemologis, paradigma ini bersifat dialogis dan reflektif. Peneliti tidak ditempatkan sebagai pengamat pasif yang menjaga jarak dari objek penelitian, melainkan sebagai partisipan reflektif yang terlibat dalam proses sosial yang sedang dikaji. Pengetahuan dihasilkan melalui dialog kritis antara peneliti dan subjek penelitian, dengan tujuan untuk membuka kesadaran akan struktur ketidakadilan dan ketimpangan yang tersembunyi di balik praktik sosial sehari-hari.

Dari sisi aksiologi, paradigma kritis berorientasi pada keadilan sosial dan emansipasi kelompok marjinal (Guba and Lincoln 1994). Penelitian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah, tetapi juga untuk memperjuangkan perubahan sosial yang berpihak pada kelompok yang tertindas atau kurang berdaya. Dalam konteks ini, penelitian tentang petani rakyat dalam industri karet remah diarahkan untuk memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan antara petani, koperasi, industri, dan lembaga keuangan, serta untuk mengidentifikasi peluang-peluang transformasi menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan paradigma kritis dalam penelitian keberlanjutan menjadi sangat relevan karena paradigma ini menolak pandangan teknokratis dan universal tentang keberlanjutan. Pendekatan dominan sering kali menempatkan keberlanjutan sebagai persoalan manajemen sumber daya atau efisiensi produksi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial-politik dan ketimpangan struktural yang terjadi di lapangan. Paradigma kritis memandang keberlanjutan sebagai arena konflik

sosial, di mana berbagai aktor memperjuangkan kepentingan dan makna yang berbeda.

Dengan demikian, keberlanjutan tidak dapat dipahami hanya melalui indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bersifat formal, tetapi harus ditafsir ulang berdasarkan pengalaman dan suara aktor local dalam hal ini, para petani rakyat yang menjadi bagian paling rentan namun paling vital dalam rantai industri karet remah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan emansipatoris ilmu pengetahuan: membebaskan pengetahuan dari dominasi ideologi dan memberikan ruang bagi makna alternatif yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat.

2.5. Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai Kerangka Analisis

Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan pendekatan analisis yang berupaya mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik sosial. CDA berasumsi bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan realitas sosial dan reproduksi kekuasaan (Fairclough 1992). Melalui analisis wacana, peneliti dapat memahami bagaimana struktur sosial dan politik termanifestasi dalam teks, serta bagaimana makna tertentu menjadi dominan dan diterima secara luas sebagai “kebenaran” sosial.

Menurut (Fairclough 1992) mengembangkan model CDA yang terdiri dari tiga dimensi analisis yang saling berkaitan, yaitu :

- 1. Dimensi Teks (*Text*):** berfokus pada analisis linguistik dan naratif terhadap kata, metafora, serta struktur bahasa yang digunakan dalam wacana keberlanjutan. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana pilihan bahasa tertentu dapat membangun legitimasi ide, menormalisasi ketimpangan, atau menyembunyikan kepentingan dominan di balik istilah seperti “efisiensi”, “produktivitas”, atau “pembangunan hijau”.
- 2. Dimensi Praktik Diskursif (*Discursive Practice*):** mengkaji bagaimana teks dan wacana tersebut diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh berbagai aktor sosial. Pada tahap ini, peneliti menelusuri peran kebijakan pemerintah, laporan CSR, media, dan interaksi kelembagaan dalam menyebarkan wacana

keberlanjutan yang cenderung berpihak pada industri. Dimensi ini membantu memahami bagaimana makna keberlanjutan terbentuk melalui proses sosial dan institusional.

3. Dimensi Praktik Sosial (*Social Practice*): memeriksa struktur kekuasaan dan ideologi yang mendasari produksi wacana. Analisis ini menyoroiti bagaimana relasi antara petani, pabrik, koperasi, dan lembaga keuangan diatur oleh sistem ekonomi-politik yang lebih luas, yang kemudian memengaruhi siapa yang berhak mendefinisikan dan mengontrol makna keberlanjutan.

Melalui tiga dimensi tersebut, CDA memberikan kerangka konseptual untuk menghubungkan level mikro (teks dan bahasa) dengan level makro (struktur sosial dan ekonomi-politik). Pendekatan ini menekankan bahwa wacana tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan konteks sosial yang lebih luas dan berperan aktif dalam mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang ada.

Dalam konteks penelitian keberlanjutan pada industri karet remah di Sumatera Selatan, CDA digunakan untuk menelusuri bagaimana wacana keberlanjutan dibentuk dan dimaknai oleh berbagai aktor, serta bagaimana wacana tersebut mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi industri dan kesejahteraan petani rakyat. Misalnya, istilah “produksi berkelanjutan” atau “sertifikasi hijau” sering digunakan membangun citra positif industri, namun belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, CDA berfungsi sebagai alat kritis untuk membuka tabir ideologi yang tersembunyi dalam bahasa dan kebijakan keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma kritis-interpretif yang digunakan dalam penelitian ini, karena keduanya berfokus pada upaya memahami dan mengubah realitas sosial melalui kesadaran reflektif dan analisis struktur kekuasaan yang melandasinya.

Melalui penerapan CDA model Fairclough, penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana wacana keberlanjutan dibentuk, tetapi juga bagaimana petani rakyat menegosiasikan dan merekonstruksi makna keberlanjutan berdasarkan pengalaman, konteks lokal, dan nilai-nilai sosial yang mereka miliki. Dengan demikian, analisis wacana menjadi sarana untuk memahami keberlanjutan sebagai

arena perjuangan makna yang terus berkembang di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari sintesis antara teori keberlanjutan sebagai wacana sosial, paradigma kritis, dan posisi petani rakyat dalam rantai nilai global industri karet remah. Tujuan utama dari kerangka ini adalah memahami bagaimana makna keberlanjutan dikonstruksi, disebarluaskan, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang tidak seimbang.

Konsep keberlanjutan yang menjadi fokus penelitian tidak dipahami sebagai konsep teknis atau normatif semata misalnya efisiensi produksi, sertifikasi, atau pelestarian lingkungan melainkan sebagai wacana sosial (*social discourse*) yang sarat dengan kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan. Perspektif ini mengandaikan bahwa setiap narasi tentang “keberlanjutan” selalu mengandung klaim kebenaran (*truth claim*) yang dibentuk dan dilegitimasi oleh aktor-aktor dominan seperti korporasi, pemerintah, atau lembaga sertifikasi internasional (Dryzek 2022).

Dalam konteks industri karet remah, wacana keberlanjutan sering dimaknai sebagai “produksi bersih,” “efisiensi rantai pasok,” atau “penerapan standar sertifikasi”. Namun, dari sudut pandang petani rakyat, keberlanjutan lebih bermakna pada stabilitas pendapatan, keadilan harga, dan kemandirian ekonomi. Perbedaan makna ini menunjukkan adanya ketegangan diskursif (*discursive tension*) antara kepentingan global yang menekankan efisiensi dan kepentingan lokal yang berorientasi pada kesejahteraan.

Kerangka penelitian ini menggunakan model *Critical Discourse Analysis (CDA)* dari (Fairclough 1992) sebagai alat analisis utama. CDA memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara bahasa, praktik sosial, dan struktur kekuasaan dalam membentuk realitas keberlanjutan. Tiga dimensi analisis CDA teks, praktik diskursif, dan praktik social digunakan untuk memahami bagaimana narasi keberlanjutan diproduksi, disebarluaskan, dan diresapi oleh petani dalam kehidupan sehari-hari.

- 1. Dimensi Teks** : menganalisis bagaimana bahasa, istilah, dan metafora digunakan dalam narasi tentang keberlanjutan. Misalnya, istilah “karet berkelanjutan” atau “produksi ramah lingkungan” sering kali mengandung makna normatif yang perlu ditelaah secara kritis.
- 2. Dimensi Praktik Diskursif** : menelusuri bagaimana wacana keberlanjutan diproduksi dan direproduksi oleh berbagai aktor melalui kebijakan, laporan CSR, media, serta dokumen kemitraan.
- 3. Dimensi Praktik Sosial** : menggali bagaimana struktur kekuasaan dan ideologi ekonomi-politik (misalnya pasar global atau sistem sertifikasi) memengaruhi pemaknaan dan penerapan keberlanjutan di tingkat petani rakyat.

Dengan mengintegrasikan tiga dimensi ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan kunci :

1. Bagaimana petani rakyat memahami dan memaknai konsep keberlanjutan?
2. Bagaimana wacana keberlanjutan dikonstruksi dan dijalankan dalam interaksi antara petani, koperasi, dan industri pengolah?
3. Bagaimana relasi kekuasaan dan struktur ekonomi memengaruhi bentuk praktik keberlanjutan di tingkat lokal?

Kerangka konseptual ini digambarkan secara sederhana sebagai interaksi dinamis antara tiga elemen utama :

- 1. Wacana Keberlanjutan (*Discourse of Sustainability*)** – sebagai produk bahasa dan simbol yang digunakan untuk mengatur praktik sosial.
- 2. Aktor Sosial (*Social Actors*)** – meliputi petani, koperasi, industri, dan lembaga eksternal yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda dalam rantai nilai karet.
- 3. Struktur Kekuasaan (*Power Structure*)** – mencakup sistem ekonomi, kebijakan, dan ideologi yang membingkai relasi antara aktor-aktor tersebut.

Ketiga elemen ini saling memengaruhi dan menciptakan ruang dialektis di mana makna keberlanjutan terus dinegosiasikan. Petani bukan hanya sekadar penerima

kebijakan atau objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang menafsirkan kembali makna keberlanjutan sesuai dengan konteks kehidupannya.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian menempatkan keberlanjutan sebagai arena wacana dan perjuangan sosial, di mana praktik bahasa, struktur ekonomi, dan relasi kekuasaan berinteraksi untuk membentuk pemaknaan yang beragam dan sering kali bertentangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari praktik keberlanjutan yang sering diabaikan oleh pendekatan teknokratis, serta memberikan ruang bagi suara petani rakyat menjadi bagian dari narasi keberlanjutan yang adil dan inklusif.

2.7. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Kajian tentang keberlanjutan dalam industri karet remah di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan positivistik dan post-positivistik yang menekankan aspek teknis, efisiensi, serta pengukuran kuantitatif atas dampak ekonomi maupun lingkungan. Studi-studi tersebut cenderung melihat keberlanjutan sebagai fenomena objektif yang dapat dinilai melalui indikator seperti produktivitas, emisi karbon, atau efisiensi energi. Pendekatan ini penting untuk menghasilkan data empiris yang terukur, tetapi kurang mampu menangkap dimensi sosial, relasional, dan ideologis yang turut menentukan keberlanjutan dalam praktik.

Sementara itu, penelitian dengan paradigma konstruktivisme mulai menggeser fokus menuju pemahaman makna keberlanjutan dari sudut pandang aktor lokal, seperti petani, koperasi, dan masyarakat desa. Pendekatan ini menyoroti bahwa realitas keberlanjutan bersifat kontekstual dan multi-perspektif, bergantung pada pengalaman sosial-budaya para pelaku. Namun, sebagian besar penelitian konstruktivis berhenti pada tataran deskriptif menggambarkan persepsi atau praktik lokal tanpa menelaah relasi kekuasaan dan ketimpangan struktural yang memengaruhi posisi petani dalam rantai nilai global.

Dalam konteks industri karet remah, kondisi petani kecil masih sangat rentan terhadap mekanisme harga global, dominasi korporasi pengolah, dan sistem sertifikasi yang bias kepentingan industri (Li, 2020). Meskipun banyak inisiatif

keberlanjutan diklaim telah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi petani, faktanya sebagian besar skema tersebut masih mereproduksi ketergantungan dan asimetrinya relasi ekonomi-politik. Inilah yang tidak terungkap dalam pendekatan positivistik maupun konstruktivistik.

Kekosongan teoretis dan empiris ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan paradigma kritis yang tidak hanya mendeskripsikan atau mengukur fenomena keberlanjutan, tetapi juga menganalisis struktur dominasi, ideologi, dan kekuasaan yang melatarbelakanginya. Paradigma kritis memungkinkan penelitian untuk menyoroti bagaimana kebijakan, praktik industri, dan narasi keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat hegemoni atau sebaliknya, sebagai ruang resistensi bagi petani kecil untuk memperoleh keadilan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya studi yang:

1. Menggunakan pendekatan kritis untuk mengungkap relasi kekuasaan dalam praktik keberlanjutan industri karet remah.
2. Menganalisis bagaimana struktur ekonomi-politik global membentuk posisi petani dan mempengaruhi distribusi nilai tambah.
3. Menelusuri dimensi ideologis dan normatif dari praktik “keberlanjutan korporasi” yang sering kali menutupi bentuk eksploitasi baru.
4. Mengembangkan model keberlanjutan yang inklusif dan emansipatif, berbasis pada dialog dan partisipasi aktor lokal, bukan sekadar kepatuhan terhadap standar global.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan berlandaskan pada paradigma penelitian kritis-interpretif. Pendekatan ini dipilih karena berorientasi pada upaya memahami realitas sosial secara mendalam sekaligus mengungkap struktur kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan yang memengaruhi pengalaman subjek penelitian. Dalam konteks industri karet remah, paradigma ini memungkinkan peneliti untuk melihat keberlanjutan bukan hanya sebagai konsep

teknis atau kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi antara petani, koperasi, industri, dan lembaga negara.

Desain penelitian diarahkan untuk mengungkap makna sosial dan relasi kekuasaan yang membentuk pemahaman petani rakyat tentang keberlanjutan. Melalui desain ini, penelitian berfokus pada proses bagaimana petani menginterpretasikan nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka baik dalam praktik budidaya, hubungan kemitraan dengan pabrik, maupun keterlibatan dalam kebijakan sertifikasi dan program tanggung jawab sosial (CSR).

Pendekatan kritis-interpretif juga menekankan pentingnya refleksi peneliti terhadap posisi sosialnya dalam proses produksi pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami *apa* yang dimaknai petani tentang keberlanjutan, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* makna tersebut terbentuk melalui interaksi sosial, struktur ekonomi, dan wacana pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan oleh aktor-aktor dominan.

Paradigma ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang bersifat emansipatoris, yaitu membuka ruang bagi suara dan pengalaman petani rakyat yang sering kali terpinggirkan dalam narasi besar industri dan kebijakan pembangunan.

3.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kabupaten penghasil karet utama di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Ketiga wilayah tersebut dipilih secara purposif karena memiliki proporsi besar petani karet rakyat dan menunjukkan dinamika hubungan yang erat antara petani, koperasi, serta industri pengolah karet remah. Selain itu, kawasan ini merepresentasikan variasi konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang relevan memahami konstruksi makna keberlanjutan di tingkat akar rumput.

Kabupaten Musi Banyuasin dikenal sebagai salah satu sentra utama produksi karet rakyat di Sumatera Selatan, dengan sistem pemasaran yang masih bergantung pada jaringan pengepul dan koperasi. Kabupaten Banyuasin memiliki karakteristik wilayah yang berdekatan dengan pusat industri karet remah, sehingga interaksi

antara petani dan pihak pabrik lebih intensif. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir dipilih karena memperlihatkan dinamika sosial-ekonomi yang khas, termasuk pengaruh program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan.

Subjek penelitian meliputi beragam aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam rantai nilai industri karet remah. Mereka terdiri atas petani karet rakyat sebagai pelaku utama produksi; pengepul dan pengurus koperasi yang berperan dalam pengumpulan dan penjualan hasil; aktivis LSM lingkungan yang mendorong inisiatif keberlanjutan; serta perwakilan pabrik pengolah karet remah yang menjadi pihak offtaker dan penentu standar mutu serta kebijakan pembelian.

Keterlibatan berbagai aktor ini memungkinkan penelitian untuk melihat keberlanjutan sebagai proses sosial yang kompleks, di mana makna, kepentingan, dan kekuasaan berinteraksi secara dinamis dalam konteks ekonomi lokal dan tekanan pasar global.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif yang dirancang untuk menggali secara mendalam makna dan praktik keberlanjutan di kalangan petani rakyat dalam industri karet remah di Sumatera Selatan.

1. **Wawancara mendalam** dilakukan terhadap 25 informan utama, yang terdiri atas petani karet rakyat, tokoh masyarakat lokal, serta pengurus koperasi. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memahami pengalaman personal, pandangan, serta strategi adaptif petani dalam menghadapi dinamika harga, kebijakan, dan tuntutan keberlanjutan dari industri maupun pemerintah.
2. **Focus Group Discussion (FGD)** dilaksanakan dengan beberapa kelompok petani, untuk menggali persepsi kolektif dan membandingkan variasi pandangan antaranggota komunitas. FGD ini juga berfungsi untuk memvalidasi hasil wawancara individu serta mengidentifikasi nilai-nilai bersama yang membentuk pemahaman lokal tentang keberlanjutan.

3. **Observasi partisipatif** dilakukan dengan terlibat langsung dalam aktivitas petani, seperti proses penjualan getah, rapat koperasi, serta interaksi antara petani dan pihak pabrik. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik ekonomi dan sosial yang sering kali tidak terungkap dalam wawancara formal.

4. **Analisis dokumen** mencakup penelaahan terhadap laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kebijakan sertifikasi berkelanjutan, serta dokumen kontrak kemitraan antara petani, koperasi, dan industri. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana wacana keberlanjutan dikonstruksi secara institusional dan diimplementasikan dalam praktik lapangan.

Kombinasi keempat teknik tersebut memungkinkan triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman pemahaman terhadap makna keberlanjutan dari perspektif petani rakyat. Pendekatan ini juga selaras dengan paradigma penelitian kritis, yang menekankan pentingnya melihat hubungan antara struktur kekuasaan, produksi wacana, dan pengalaman aktor di tingkat akar rumput.

3.3. Teknik Analisa Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis (CDA)* model (Fairclough, 1992), yang menelaah hubungan antara bahasa, wacana, dan konteks sosial melalui tiga dimensi utama:

1. **Teks:** menganalisis bahasa, pilihan kata, dan narasi yang digunakan untuk membentuk makna keberlanjutan. Fokus pada dimensi ini adalah memahami bagaimana istilah “keberlanjutan” dikonstruksi dalam tuturan, laporan, dan praktik komunikasi petani serta aktor lain di industri karet remah.
2. **Praktik diskursif:** mengkaji bagaimana wacana keberlanjutan diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi melalui berbagai saluran seperti kebijakan pemerintah, laporan kelembagaan, media, maupun interaksi sosial antar pelaku rantai pasok. Dimensi ini menyoroti proses reproduksi makna dan kekuatan narasi yang membentuk persepsi bersama tentang keberlanjutan.

3. **Praktik sosial:** menelaah struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan ideologi yang menopang serta memengaruhi konstruksi wacana keberlanjutan. Analisis ini melihat bagaimana relasi kuasa antara petani rakyat, industri, pemerintah, dan lembaga keuangan berperan dalam menentukan arah dan makna keberlanjutan itu sendiri.

Pendekatan CDA Fairclough ini memungkinkan penelitian untuk melampaui pemahaman keberlanjutan secara permukaan (sekadar ekonomi, sosial, atau lingkungan), dan menggali dinamika sosial-politik yang tersembunyi di balik cara petani rakyat memahami serta mempraktikkan keberlanjutan dalam konteks industri karet remah di Sumatera Selatan.

3.4. Validitas dan Posisi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memosisikan diri sebagai partisipan reflektif, bukan sekadar pengamat netral. Posisi ini dipilih karena penelitian kualitatif kritis menempatkan peneliti sebagai bagian dari proses sosial yang diteliti, bukan sebagai pihak eksternal yang sepenuhnya objektif. Dengan demikian, peneliti berinteraksi secara langsung dengan para informan, memahami konteks kehidupan mereka, dan secara sadar merefleksikan bagaimana nilai, pengalaman, serta latar belakang pribadi dapat memengaruhi proses interpretasi data.

Validitas penelitian dijaga melalui beberapa strategi utama. Pertama, dilakukan *member checking*, yaitu meminta konfirmasi dan klarifikasi dari para informan terhadap hasil interpretasi sementara peneliti, guna memastikan kesesuaian antara makna yang ditangkap peneliti dan pengalaman aktual partisipan. Kedua, diterapkan triangulasi sumber data, dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis data (wawancara, FGD, observasi, dan dokumen) untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Ketiga, peneliti melakukan refleksi berkelanjutan terhadap potensi bias dan nilai-nilai pribadi yang mungkin memengaruhi proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Selain itu, prinsip *researcher positionality* dijaga melalui pencatatan reflektif dan etis dalam catatan lapangan (*field notes*). Setiap tahap penelitian disertai dengan refleksi

kritis atas posisi peneliti, relasi kekuasaan dengan partisipan, serta dampak sosial dan moral dari interpretasi yang dihasilkan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman empiris tentang makna keberlanjutan, tetapi juga mencerminkan kesadaran etis dan epistemologis peneliti dalam proses produksi pengetahuan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Makna Keberlanjutan bagi Petani Karet

Bagi petani rakyat, keberlanjutan tidak dimaknai sekadar sebagai kepatuhan terhadap standar lingkungan atau pemenuhan sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Sebaliknya, keberlanjutan dipahami dalam konteks keseharian mereka sebagai “keberlangsungan hidup” sebuah kondisi di mana keluarga dapat bertahan secara ekonomi, menjaga kelestarian kebun karet, serta menjamin masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Seorang petani di Musi Banyuasin menggambarkan hal ini dengan jelas:

“Kalau harga karet jatuh, mana bisa bicara soal ramah lingkungan. Bagi kami, yang penting bisa bertahan dan anak sekolah.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dimensi ekonomi merupakan fondasi utama dari pemaknaan keberlanjutan bagi petani kecil. Bagi mereka, isu lingkungan dan sosial tidak dapat dipisahkan dari kenyataan ekonomi yang menekan. Ketika harga karet turun drastis, praktik ramah lingkungan seperti penyadapan berkelanjutan, pengelolaan limbah, atau diversifikasi tanaman menjadi sulit diterapkan karena kebutuhan dasar belum terpenuhi.

Lebih jauh, petani memandang bahwa keberlanjutan yang hanya berfokus pada sertifikasi dan standar teknis justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Mereka merasa bahwa program-program keberlanjutan sering kali hanya menguntungkan perusahaan besar dan pembeli internasional, sementara petani tetap berada dalam posisi paling lemah dalam rantai nilai. Bagi mereka, keberlanjutan sejati harus mencakup jaminan harga yang adil, akses terhadap pembiayaan, dan partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan industri karet.

Dengan demikian, makna keberlanjutan di tingkat petani tidak bersifat abstrak atau normatif, melainkan lahir dari pengalaman konkret menghadapi fluktuasi pasar, tekanan biaya produksi, dan ketimpangan relasi ekonomi. Pandangan ini memperlihatkan bahwa wacana keberlanjutan dalam industri karet perlu direkontekstualisasi agar inklusif terhadap realitas sosial-ekonomi petani rakyat.

4.2. Struktur Kekuasaan dan Wacana Dominan

Hasil analisis wacana menunjukkan bahwa definisi keberlanjutan dalam industri karet remah didominasi oleh narasi korporasi dan aktor-aktor institusional yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun simbolik. Pabrik pengolah dan pembeli besar menetapkan makna keberlanjutan secara sepihak sebagai “*produksi efisien, mutu tinggi, dan zero deforestation*”. Narasi ini kemudian diinternalisasi ke dalam berbagai kebijakan, program sertifikasi, serta mekanisme audit yang menekankan kepatuhan teknis terhadap standar tertentu.

Namun, petani rakyat sebagai aktor utama dalam rantai pasok hulu tidak memiliki ruang untuk menentukan indikator keberlanjutan yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi mereka. Dalam praktiknya, proses audit dan sertifikasi sering berfungsi sebagai alat kontrol hierarkis, yang menuntut petani mematuhi protokol keberlanjutan tanpa adanya negosiasi atau dukungan struktural yang memadai. (Boiral 2013) menyebut fenomena ini sebagai bentuk *simulacra of sustainability*, di mana pelaporan dan sertifikasi hanya menciptakan ilusi keberlanjutan tanpa perubahan substantif dalam kesejahteraan aktor lapangan.

Lebih jauh, analisis dokumen industri seperti laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pedoman sertifikasi, dan kontrak kemitraan menunjukkan bahwa wacana keberlanjutan lebih menonjolkan dimensi lingkungan dibandingkan keadilan sosial. Fokus utama diarahkan pada isu konservasi hutan dan efisiensi produksi, sementara aspek pemerataan nilai tambah, partisipasi petani, dan kesejahteraan komunitas lokal kurang mendapat perhatian.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Li 2020) mengenai konsep *technocratic sustainability*, yakni keberlanjutan yang berfungsi untuk melegitimasi praktik

eksploitatif dalam struktur rantai nilai global. Melalui bahasa teknis dan simbol keberlanjutan yang berorientasi pada pasar, kekuasaan korporasi diperkuat dan ketimpangan struktural justru dipertahankan. Dalam konteks ini, keberlanjutan menjadi instrumen ideologis yang menormalisasi ketidaksetaraan, alih-alih mendorong transformasi sosial.

Wacana dominan tersebut memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan, bahasa, dan ideologi saling berkelindan dalam membentuk persepsi publik tentang keberlanjutan. Bagi petani rakyat, posisi mereka dalam rantai nilai ditentukan bukan hanya oleh mekanisme ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana keberlanjutan didefinisikan dan dikontrol oleh aktor yang lebih berkuasa.

4.3. Resistensi dan Narasi Tandingan

Di tengah dominasi wacana keberlanjutan yang dikendalikan oleh korporasi, petani karet rakyat mulai membangun bentuk-bentuk resistensi simbolik dan praksis. Resistensi ini muncul tidak selalu dalam bentuk konfrontasi terbuka, melainkan melalui tindakan sehari-hari yang menegaskan otonomi dan pengetahuan lokal mereka. Misalnya, sebagian kelompok petani di Musi Banyuasin dan Jambi memilih untuk membentuk koperasi pemasaran sendiri guna menghindari praktik harga yang ditentukan sepihak oleh pabrik pengumpul.

Narasi tandingan yang muncul dari lapangan memperlihatkan bahwa bagi petani, keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari keadilan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya. Petani menolak pemaknaan keberlanjutan yang semata-mata berbasis teknokratis atau administrative seperti sertifikasi FSC atau ISCC tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Narasi ini dapat disebut sebagai bentuk “*sustainability from below*” (Forsyth 2018), yaitu keberlanjutan yang lahir dari pengalaman dan kebutuhan komunitas akar rumput.

Praktik resistensi juga tampak dalam cara petani menafsirkan ulang indikator lingkungan. Misalnya, ketika perusahaan menekankan penebangan pohon tidak produktif sebagai bagian dari replanting program, sebagian petani menolak dengan alasan bahwa pohon tua memiliki nilai ekologis dan historis tertentu. Bagi mereka,

keberlanjutan bukan berarti mengganti pohon demi efisiensi, melainkan menjaga keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan desa selama beberapa dekade.

Lebih jauh, resistensi ini juga bersifat epistemologis: petani menantang otoritas pengetahuan yang diklaim oleh lembaga sertifikasi atau auditor. Mereka mengembangkan “pengetahuan ekologis lokal” (*indigenous ecological knowledge*) untuk menilai kesehatan tanah, kualitas lateks, dan pola tanam berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi arena kontestasi makna rasionalitas teknokratik dan kebijaksanaan lokal.

Dalam konteks sosial-politik, narasi tandingan petani ini berpotensi menjadi dasar pembentukan model inclusive closed-loop supply chain yang lebih adil. Model tersebut mengakui posisi petani bukan sebagai objek intervensi, tetapi sebagai subjek pengetahuan dan mitra strategis dalam sistem rantai pasok hijau. Dengan demikian, resistensi petani tidak hanya dilihat sebagai bentuk penolakan, tetapi juga sebagai ekspresi transformasi menuju sistem keberlanjutan yang lebih demokratis dan partisipatif.

4.4. Keberlanjutan Kritis dan Transformasi Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa makna keberlanjutan yang hidup di kalangan petani karet bersifat kritis dan emansipatoris. Bagi mereka, keberlanjutan bukan sekadar upaya memenuhi standar lingkungan atau sertifikasi global, melainkan perjuangan untuk membebaskan diri dari struktur ketimpangan ekonomi yang telah lama menguasai rantai nilai. Dalam konteks ini, keberlanjutan dipahami sebagai proses transformasi sosial yang berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan partisipatif.

Pendekatan keberlanjutan kritis (*critical sustainability*) menggaris bawahi pentingnya redistribusi nilai tambah, akses pembiayaan hijau yang inklusif, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal (*local wisdom*) petani dalam menentukan praktik budidaya yang sesuai dengan konteks ekologi dan budaya setempat. Perspektif ini menolak pandangan teknokratik yang memisahkan antara efisiensi

produksi dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, ia menuntut integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kerangka keadilan struktural.

Paradigma kritis, sebagaimana dijelaskan oleh (Habermas 1984), menempatkan komunikasi rasional dan kesadaran reflektif sebagai sarana pembebasan dari distorsi sistemik yang diciptakan oleh kapitalisme industri. Dalam konteks industri karet, proses emansipasi ini dapat diwujudkan melalui dialog deliberatif antara petani, industri, pemerintah, dan lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih setara.

Selaras dengan pandangan (Escobar 2011) keberlanjutan tidak boleh dilihat sebagai “proyek pembangunan” yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai hasil negosiasi sosial yang berakar pada realitas lokal. Dengan demikian, transformasi menuju keberlanjutan sejati hanya dapat dicapai ketika struktur kekuasaan dalam rantai nilai diubah secara fundamental dari relasi subordinatif menuju kolaboratif.

Keberlanjutan kritis ini pada akhirnya menegaskan bahwa agenda keberlanjutan harus berorientasi pada keadilan sosial-ekologis (*socio-ecological justice*), di mana keseimbangan antara manusia, alam, dan ekonomi tidak ditentukan oleh pasar global, melainkan oleh nilai keadilan, solidaritas, dan kemandirian komunitas lokal.

5. Implikasi Teori dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya wacana ilmiah dengan memosisikan keberlanjutan bukan sebagai konsep netral dan universal, melainkan sebagai konstruksi sosial yang sarat relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik. Melalui pendekatan paradigma kritis, studi ini menjembatani kesenjangan antara teori keberlanjutan yang ideal, seperti triple bottom line, dengan realitas empiris ketimpangan struktural di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan harus dipahami bukan hanya sebagai upaya teknokratis untuk efisiensi dan konservasi, melainkan sebagai proyek emansipasi sosial yang berorientasi pada keadilan. Lebih lanjut, penelitian ini memvalidasi pengetahuan lokal petani (*local knowledge*) sebagai sumber epistemik yang sah, mendorong lahirnya model keberlanjutan berbasis epistemologi partisipatif. Dengan demikian,

implikasi utamanya adalah penguatan konsep critical sustainability (keberlanjutan kritis) suatu pendekatan yang menelaah bagaimana struktur kekuasaan memengaruhi distribusi manfaat, serta memosisikan keberlanjutan sebagai arena politik dan moral yang menuntut refleksi etis.

Implikasi praktis dari temuan ini menuntut adanya perumusan kebijakan dan strategi industri karet remah yang lebih adil dan inklusif. Pertama, standar sertifikasi keberlanjutan global perlu direvisi agar mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, distribusi nilai tambah, dan posisi tawar petani, sehingga tidak hanya menjadi alat legitimasi korporasi. Kedua, keberlanjutan menuntut penguatan kapasitas kelembagaan petani melalui koperasi, yang didukung oleh akses terhadap pembiayaan hijau (*green finance*) dan program capacity building agar petani memiliki daya tawar institusional. Ketiga, prinsip partisipasi deliberatif harus diimplementasikan agar petani dilibatkan sebagai subjek penentu arah kebijakan, bukan sekadar objek. Sebagai solusi sistemik, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model *Inclusive Closed-Loop Supply Chain* (ICLSC), di mana seluruh aktor berkolaborasi secara sinergis untuk mengoptimalkan efisiensi, mengurangi limbah, sekaligus memastikan keadilan distribusi manfaat. Integrasi teori dan praktik ini menegaskan bahwa keberlanjutan sejati hanya dapat dicapai melalui transformasi struktural dan kesetaraan relasi kekuasaan, menjadikannya bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga perjuangan moral untuk keadilan.

6. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari kesadaran kritis bahwa keberlanjutan bukanlah sebuah konsep universal yang bebas nilai, melainkan sebuah wacana sosial yang diproduksi dan dinegosiasikan melalui bahasa serta praktik ekonomi-politik. Dengan menggunakan analisis wacana model Fairclough, penelitian ini menyingkap bagaimana makna keberlanjutan dalam industri karet remah di Sumatera Selatan dibentuk dan sering kali dimonopoli oleh aktor-aktor dominan. Ditemukan bahwa bagi petani rakyat, keberlanjutan tidak dimaknai sebatas efisiensi produksi atau pemenuhan standar sertifikasi. Sebaliknya, ia adalah upaya kolektif untuk mempertahankan kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat di tengah

ketimpangan struktural. Wacana keberlanjutan yang selama ini dikendalikan oleh korporasi dan kebijakan teknokratis terbukti telah menyingkirkan suara petani, menjadikan mereka sekadar objek dari sistem yang mengklaim dirinya “berkelanjutan”.

Temuan studi ini menegaskan bahwa pengetahuan lokal dan pengalaman reflektif petani memiliki nilai epistemik yang signifikan untuk memperkaya konsep keberlanjutan yang lebih kontekstual dan humanis. Oleh karena itu, keberlanjutan harus dipahami bukan hanya sebagai persoalan ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai agenda etis dan politis yang menuntut keadilan sosial serta distribusi nilai yang setara. Secara teoretis, penelitian ini memperluas horizon kajian keberlanjutan melalui lensa paradigma kritis, yang menempatkan relasi kekuasaan sebagai dimensi utama pembentuk praktik pembangunan. Temuan ini mengisi kesenjangan antara teori keberlanjutan normatif dengan realitas sosial-ekonomi petani, sekaligus menawarkan kerangka konseptual *critical sustainability* sebuah keberlanjutan yang reflektif, dialogis, dan berorientasi pada emansipasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola industri karet, di mana keberlanjutan sejati hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang setara, kelembagaan petani yang kuat, dan kolaborasi inklusif. Model *inclusive closed-loop supply chain* (ICLSC) menjadi tawaran konkret untuk membangun sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberlanjutan sejati bukan sekadar tentang menjaga alam, melainkan tentang mengembalikan kemanusiaan dalam praktik ekonomi. Suara petani, yang selama ini terpinggirkan, harus menjadi pusat dari narasi baru keberlanjutan; sebuah narasi yang tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga tentang martabat dan keadilan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang menuntut intervensi di tiga tingkatan utama. Pada level kebijakan publik, pemerintah perlu melakukan redefinisi konsep keberlanjutan dalam regulasi nasional agar secara eksplisit mengintegrasikan dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan petani, serta beralih ke pendekatan berbasis konteks lokal

(*place-based sustainability*). Hal ini harus didukung dengan penguatan sistem insentif dan skema pembiayaan hijau seperti kredit mikro berkelanjutan dan subsidi sertifikasi yang disertai mekanisme monitoring partisipatif. Selain itu, pemerintah harus mereformasi skema kemitraan industri agar berbasis pada prinsip transparansi, keadilan harga, dan distribusi nilai tambah yang setara.

Pada tingkat kelembagaan lokal dan petani, fokus utama adalah revitalisasi koperasi sebagai pusat pengelolaan rantai nilai petani, yang tidak hanya berfungsi sebagai agen penyalur hasil, tetapi juga sebagai wadah pendidikan, akses modal, dan inovasi. Upaya ini perlu didukung oleh program penyuluhan yang bergeser dari pola *top-down* menjadi pendidikan kritis agraria (*critical agrarian education*), yang bertujuan memperkuat kapasitas negosiasi dan kesadaran kolektif petani. Lebih lanjut, perlu dibentuk forum kolaboratif daerah yang mempertemukan multi-pihak (petani, industri, pemerintah, dan LSM) sebagai ruang deliberatif untuk merumuskan standar keberlanjutan yang kontekstual.

Rekomendasi bagi industri dan korporasi adalah penerapan prinsip *fair value chain*, yakni pergeseran paradigma dari sekadar *cost-efficiency* menuju *value fairness* melalui transparansi harga dan audit sosial. Korporasi didorong untuk mempraktikkan ko-produksi pengetahuan dengan melibatkan petani secara aktif dalam riset dan inovasi, sehingga menghasilkan solusi yang aplikatif. Implementasi model *Inclusive Closed-Loop Supply Chain* (ICLSC) menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan daur ulang limbah, efisiensi energi, dan pemberdayaan sosial dalam satu sistem sirkular yang sejalan dengan visi ekonomi sirkular berkeadilan (*just circular economy*).

Terakhir, untuk penelitian lanjutan, studi ini membuka beberapa agenda riset. Diperlukan analisis kuantitatif untuk memetakan secara tegas distribusi nilai tambah di sepanjang rantai pasok, guna melengkapi temuan kualitatif ini. Studi perbandingan lintas daerah atau komoditas juga esensial untuk memahami bagaimana konteks sosial-budaya memengaruhi praktik keberlanjutan. Selain itu, direkomendasikan adanya eksperimen kebijakan inklusif, seperti uji coba model ICLSC, untuk mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan petani. Dengan arah

tersebut, riset masa depan diharapkan dapat bergeser dari fokus efisiensi produksi menuju fokus pada keadilan struktural, redistribusi kekuasaan, dan transformasi sosial dalam sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia.

7. Daftar Pustaka

- Banerjee, S. Bobby. "Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention of Nature". *Organization Studies*, 24(1), (2003): 143–180.
- Berger, Peter., and Luckmann, Thomas. "The Social Construction Of Reality". In *Social theory re-wired*. Routledge. (2016): 0–122
- Boiral, Olivier. "Sustainability Reports As Simulacra? A Counter-Account Of A And A+ GRI Reports". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), (2013): 1036–1071.
- Brundtland, Gro Harlem, and Khalid Mansour. "Our Common Future". World Commission On Environment And Development (Wced). 1987, (2010).
- Bryant, Raymond L., and Bailey, Sinead. "Third World Political Ecology". Psychology Press. (1997).
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. "The Sage Handbook of Qualitative Research." Thousand Oaks, CA: Sage, 2011.
- Dryzek, John S. "The Politics of the Earth: Environmental Discourses." Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Elkington, John. "Cannibals with Forks." Oxford: Capstone Publishing, 1997.
- Elkington, John, and Ian H. Rowlands. "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business." *Alternatives Journal* 25, no. 4 (1999): 42.
- Escobar, Arturo. "Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World." Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Fairclough, Norman. "Discourse and Social Change." Cambridge: Polity Press, 1992.
- Forsyth, Tim. "Is Resilience to Climate Change Socially Inclusive? Investigating Theories of Change Processes in Myanmar." *World Development* (2018).
- Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." In *Handbook of Qualitative Research*, 105(2), 1994: 163–194.
- Habermas, Jürgen. "Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society." Boston: Beacon Press, 1984.
- Kincheloe, Joe L., and Peter McLaren. "Rethinking Critical Theory and Qualitative Research." In *Key Works in Critical Pedagogy*, Rotterdam: SensePublishers, 2011: 285–326.

- Kuhn, Thomas. "Criticism and the Growth of Knowledge: Reflections on My Critics." (1970): 231-278.
- Li, Tania M. "Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier." Durham: Duke University Press, 2020.
- Mayadah, Ummu. "Positivisme Auguste Comte." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 1 (2022).
- Milne, Derek. "Can We Enhance the Training of Clinical Supervisors? A National Pilot Study of an Evidence-Based Approach." *Clinical Psychology & Psychotherapy* 17, no. 4 (2009): 321-328.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. "Statistics of Oil Palm Plantations in Indonesia." Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019.
- Popper, Karl. "The Logic of Scientific Discovery." *Systematic Biology* 26 (1959): 361.
- Schaltegger, Stefan, and Roger Burritt. "Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability: Differentiating Ethical Motivations." *Journal of Business Ethics* 147 (2018): 241-259.